

BERTUBI-TUBI! KPK OTT DI BANTEN HINGGA BEKASI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang publik dengan menggelar operasi tangkap tangan (OTT) dalam bertubi-tubi, di Provinsi Banten dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat serta di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Kamis (18/12/2025). Operasi senyap tersebut menandai babak baru pengusutan dugaan korupsi di daerah. Di Kabupaten Bekasi, penyidik KPK mengamankan sedikitnya 10 orang dalam OTT yang dilakukan pada Kamis malam. Ruang Bupati Bekasi turut disegel. Sementara itu, di Banten, KPK juga menggelar OTT yang melibatkan aparat penegak hukum. Dalam operasi ini, penyidik menyita uang tunai sekitar Rp900 juta sebagai barang bukti dan mengamankan sembilan orang, termasuk seorang oknum jaksa, dua pengacara, serta sejumlah pihak swasta. KPK menegaskan, status hukum seluruh pihak yang ditangkap akan ditentukan dalam waktu 1x24 jam sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara, dalam operasi senyap Kalsel, komisi anti-rasuah mengamankan sebanyak enam orang. Rangkaian OTT tersebut menambah daftar panjang penindakan KPK sepanjang 2025.

BACA HAL 11...

OTT KPK SEPANJANG 2025

Maret 2025 - Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan

Dugaan korupsi pekerjaan umum, menjerat anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR.

Juni 2025 - Provinsi Sumatera Utara

Dugaan suap proyek jalan, melibatkan Dinas PUPR Sumut dan Satker Jalan Nasional Wilayah I.

7-8 Agustus 2025 - Jakarta, Kendari, dan Makassar

Dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

13 Agustus 2025 - Jakarta

Kasus: Dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan

20 Agustus 2025 - Jakarta

Dugaan pemerasan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu.

3 November 2025 - Provinsi Riau

Dugaan pemerasan di lingkungan Pemprov Riau, Gubernur Riau ditetapkan tersangka.

7 November 2025 - Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur

Dugaan suap jabatan, proyek RSUD, dan gratifikasi, menjerat Bupati Ponorogo.

9-10 Desember 2025 - Kabupaten Lampung Tengah, Lampung

Dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi, Bupati Lampung Tengah jadi tersangka.

18 Desember 2025 - Banten dan Bekasi

Dugaan suap dan pengurusan perkara, menutup deretan OTT KPK sepanjang 2025.



Data Pengurangan Luas Hutan Per Provinsi (2014-2024)**Sumatera Utara**

- Mengalami kehilangan hutan lindung paling luas dibandingkan dua provinsi lainnya.
- Tingkat kehilangan hutan lindung di Sumut mencapai 40% pada tahun 2024.
- Total luas yang berkurang: Hutan Lindung sebesar 482.821,04 ha dan Hutan Konservasi sebesar 51.232,75 ha.

Aceh

- Menjadi wilayah dengan kehilangan hutan konservasi terluas.
- Hutan konservasi menyusut hingga 27% atau berkurang sekitar 282 ribu ha.
- Hutan lindung menyusut sebesar 6% atau berkurang sekitar 113 ribu ha.
- Total kawasan hutan yang harusnya dilindungi (bukan hutan produksi) yang hilang di Aceh mencapai 395 ribu ha.

Sumatera Barat

- Rincian angka pengurangan: Hutan Lindung sebesar 222.012,05 ha dan Hutan Konservasi sebesar 140.794,85 ha.



Wali Kota Medan Rico Waas menyebut pengembalian ini dilakukan usai pihaknya melakukan pengecekan regulasi dari Pemerintah Pusat.

PEMKOT MEDAN KEMBALIKAN 30 TON BERAS BANTUAN DARI UEA

Pemerintah Kota Medan mengembalikan bantuan 30 ton beras dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) yang ditujukan bagi korban banjir. Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengaku dihubungi sejumlah kepala negara sahabat untuk tawaran bantuan bencana banjir-longsor di Sumatera. Prabowo mengapresiasi bantuan tersebut, tapi dia menegaskan Indonesia mampu menangani bencana di Sumatera.



Wali Kota Medan, Rico Bayu Tri Putra Waas bersama perwakilan Uni Emirat Arab (UEA) saat menyerahkan bantuan beras di Posko Bantuan Bencana Kota Medan, Gedung PKK, Medan Petisah, Sabtu (13/12/2025) (Dokumentasi Pemko Medan)

"Intinya adalah memang kita sudah cek tentang regulasi dan penyampaian. Kita cek BNPB juga, dan Kementerian Pertahanan bahwasanya memang melalui koordinasi semua, ini tidak diterima dulu," ujar Rico saat diwawancarai, Kamis (18/12/2025).

Saat ditanya apakah ada teguran

dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Rico enggan menjawab. Menurutnya, pengembalian tersebut dilakukan lantaran pemerintah pusat memang tidak mengizinkan bantuan dari asing untuk korban bencana.

"Karena memang pemerintah

belum atau tidak menerima bantuan dari pihak asing. Jadi kita kembalikan dan nantinya bisa dimanfaatkan lagi. Tapi untuk Kota Medan tidak menerima," ucapnya.

Pemerintah Kota Medan sebelumnya menerima bantuan berupa 30 ton beras dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) yang ditujukan bagi korban banjir. Wali Kota Medan Rico Waas mengatakan, selain beras, bantuan yang diberikan Pemerintah Uni Emirat Arab juga berupa 300 paket masing-masing berupa; sembako, perlengkapan bayi dan perlengkapan ibadah solat.

"Nantinya bantuan ini akan dibagikan kepada warga Kota Medan yang terdampak banjir. Kota Medan sendiri belum pulih secara keseluruhannya, masyarakat masih banyak yang terdampak," ujar Rico Waas melalui keterangan tertulis, Minggu (14/12/2025).

Rico Waas mengungkapkan bantuan yang diberikan merupakan solidaritas mendalam dari Pemerintah dan masyarakat UEA, di mana duka yang dirasakan warga Kota Medan atas musibah banjir turut dirasakan oleh mereka.

"Kami tentunya Apresiasi dan sangat berterima kasih atas solidaritas yang diberikan Uni Emirat Arab dengan memberikan bantuan ke Posko Bantuan Bencana Kota Medan," katanya.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan "Sehingga, saya ditekankan banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang 'Terima kasih concern Anda, kami mampu'. Indonesia mampu mengatasi ini," katanya saat rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Sebelumnya, media asing menyoroti reaksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian atas bantuan Malaysia untuk banjir Aceh yang membuat netizen Malaysia murka.

Tito Karnavian sebelumnya sempat mengomentari bantuan medis untuk banjir yang dikirim Malaysia untuk banjir di Aceh. (wid, ant, dtc/dya)

Menteri PU Akui Maraknya Illegal Logging

MENTERI Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membeberkan maraknya kegiatan pembalakan liar atau illegal logging menjadi penyebab banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra Barat, yang menyebabkan kerusakan infrastruktur yang sangat parah.

Hal ini diungkap Dody setelah meninjau beberapa wilayah di Sumatra Barat pasca banjir bandang dan longsor, terutama di Danau Maninjau dan Lembah Anai.

"Kemarin saya ke dekat Danau Maninjau dan Lembah Anai. Masalahnya itu, ada ilegal logging, kayu itu jatuh dari atas, jadi terjadi banjir," kata Dody dalam paparannya di Media Briefing Pelepasan Relawan Kementerian PU ke Sumatra, Kamis (18/12/2025).

Di Lembah Anai, Dody pun melihat ada sebuah bukit yang kondisinya sudah tergerus dan jika ada hujan besar susulan, maka dapat menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor kembali.

"Nah itu ada satu bukit yang sudah sangat terjal (botak), sehingga

saya kemarin waktu kesana itu sudah sempat memerintahkan ke timnya Pak Dirjen Bina Marga untuk bukit ini di atensi. Itu bisa sebabkan banjir lagi nanti, kalau hujannya masih lebat," lanjut Dody.

Sementara itu ketika ia meninjau sekitar Danau Maninjau, menurut pengakuan beberapa Wali Nagari (sebutan kepala desa di Sumatra Barat), mengungkapkan praktik pembalakan liar di sekitar wilayah tersebut sudah sering terjadi.

"Kalau yang di Maninjau, saya juga dikasih tau oleh kepala desa (Wali Nagari) di sana, mengatakan, illegal logging sudah sering terjadi di sana, hari ini di sini, besok di sono, sama, selalu masalahnya itu, illegal logging," ujarnya.

Hal ini pun membuat banyak kayu gelondongan yang terbawa arus saat banjir bandang terjadi. Tak hanya kayu-kayu gelondongan, rusaknya bagian atas perbukitan juga membawa batu-batu besar dan membuat terjadinya longsor.

"Jadi, itu kayu-kayu pada jatuh

semua, ada juga batu-batu besar yang jatuh, dan sebagainya," ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap kegiatan pembalakan liar bisa dicegah dan harus ada penindakan, agar bencana banjir tidak terulang lagi di kemudian hari.

"Jadi ya pertama kali yang harus kita jelaskan urusan ilegal loggingnya ya, bagaimana agar kegiatan itu engga dilakukan lagi, baru setelah itu kita bicara masalah dari sisi infrastruktur yang bisa kita kerjakan di situ," terangnya.

Korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh terus bertambah. Pencarian hari ini menemukan 9 jenazah korban bencana.

"Sehingga penambahan ini mengubah jumlah total korban jiwa meninggal dunia dari 1.059 jiwa kemarin, hari ini menjadi 1.068 jiwa," ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam jumpa pers, Kamis (18/12/2025). (gus, ist/dya)

PDIP JATENG GADUH, FX RUDY DIKABARKAN MUNDUR DARI KURSI PLT KETUA

Beredar sebuah surat pengunduran diri FX Hadi Rudyatmo dari jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Surat yang tertanggal Surakarta, 12 Desember 2025 itu ditujukan langsung kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Isu tersebut makin santer beredar setelah agenda Konferensi Daerah (Konferda) DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah yang semula dijadwalkan di Jakarta pada Selasa, 16 Desember 2025, ditunda. Hingga berita ini dibuat, beberapa petinggi partai mengaku belum mengetahui kabar tersebut.

Diketahui dalam surat itu, kader Partai Banteng dengan panggilan akrab Rudy Kumis itu menuliskan identitas lengkapnya, mulai dari tempat dan tanggal lahir, alamat di Kota Surakarta, hingga nomor Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIPerjuangan.

Eks Wali Kota Surakarta itu juga mencantumkan jabatannya sebagai Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Rudy Kumis menyampaikan terima kasih kepada Megawati Soekarnoputri atas kepercayaan dan kesempatan yang telah diberikan kepada dirinya beserta keluarga.

Dia juga menyampaikan permohonan maaf karena merasa tidak mampu membalas kebaikan Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut. Rudy mengaku menilai dirinya tidak mampu menjalankan tugas sebagai Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah dalam situasi dan kondisi saat ini.

Plt Ketua DPC PDIP Solo, Teguh Prakosa, menunjukkan surat pengunduran diri FX Rudy di kantor DPC PDIP, Kamis (18/12/2025). (Dok.ist)



Dia menyebut keputusan tersebut diambil demi menjaga soliditas dan kekompakan organisasi agar tetap berjalan dengan baik.

Dalam surat itu, Rudy menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah mulai 17 Desember 2025. Kini dia sebagai anggota PDI

Perjuangan biasa.

"Dengan mengingat dan mempertimbangkan ketidakmampuan kami menjadi Pit Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah serta melihat situasi kondisi saat ini, agar organisasi tetap berjalan solid dan kompak, dengan tulus ikhlas kami mulai tanggal 17 Desember 2025

mengundurkan diri dari jabatan yang ditugaskan Ketua Umum Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri sebagai Plt. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah," tulis Rudy seperti dikutip dari surat yang diterima awak redaksi, Kamis (18/12/2025).

Rudy juga memaparkan perjalanan panjangnya di PDI Perjuangan sejak 1977. Ia menuliskan pernah menjabat sebagai Bankordes, Sekretaris Komdes, Ketua Komdes, Sekretaris Komcat, Ketua PAC PROMEG, hingga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta selama lima periode hingga tahun 2025.

Meski mundur dari jabatan struktural, Rudy menegaskan tetap setia menjadi kader PDI Perjuangan. Dia menyatakan tetap loyal, taat, dan patuh kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri serta siap berjuang memenangkan Pemilu 2029.

Sejumlah pengurus DPC PDIP Solo yang dihubungi awak media hari ini tidak memberikan respons. Baik Plt DPC PDIP Solo Teguh Prakosa maupun sejumlah petinggi DPC seperti YF Sukasno, Honda Hendarto, dan Budi Prasetyo.

Putra Rudy, Rheo Fernandez yang juga anggota F-PDIP DPRD Solo mengaku tidak mengetahui ihwal pengunduran diri ayahnya. Dia baru tahu kabar tersebut dari media.

"Enggak tahu saya. Saya tahunya tadi malam baca di media," ujar Rheo saat ditemui awak media seusa rapat konsolidasi di kantor DPC PDIP Brengosan, Kamis (18/12/2025). (wid,ist,kum/dya)

WANTI-WANTI SOAL KORUPSI DONASI BENCANA, MEGAWATI: SAYA PECAT KALIAN!



Ketua Umum (Ketum) PDI-P Megawati Soekarnoputri mewanti-wanti kadernya agar tidak mengorupsi uang sumbangan yang dikumpulkan untuk korban bencana banjir bandang dan tanah

longsor di Sumatera. Ia menegaskan akan memecat kader tersebut.

Hal ini dikatakannya dalam acara peringatan Hari Ibu 2025 "Merawat Pertiwi" di Ballroom Jayakarta, Gedung Nyi Ageng Serang, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025).

"Awas lho ibu-ibu, kalau nyumbang-nyumbang Rp 10 (miliar), Rp 5 (miliar) masuk sini (kantong), saya pecat kalian tahu," kata Megawati.

Megawati meminta para kader untuk berempati kepada para korban.

Sebab, anak-anak di daerah bencana kesulitan ketika banyak kader masih duduk nyaman. Powered by VidCrunch "Ke mana perikemanusiaan kalian? Kalian tidak melihat anak-anak seperti apa? Coba bayangkan kalau kita yang mengalami di situ bagaimana? Kita nih enak-enakan loh duduk di sini," beber Megawati.

Tak hanya itu, ia meminta kader untuk berdonasi. Sejauh ini, PDI-P telah mengumpulkan Rp 3,2 miliar untuk korban bencana. Donasi pun masih dibuka hingga 22 Desember 2025 bersamaan dengan Hari Ibu. Ia menyampaikan, selain uang, donasi juga bisa dalam bentuk barang yang dibutuhkan. Barang-barang tersebut, antara lain popok hingga beras dan bantuan pangan lainnya.

Megawati mempersilakan pemberi

bantuan memberikan barang, sesuai dengan daftar yang ia buat. "Jadi kalau ibu, ada yang mau bantu, ibu ndak pernah mau duit. Saya minta in natura, barang langsung. Tapi saya punya catatannya, saya mau ini obat sekian, beras sekian, jadi dia yang buat, bukan uangnya yang saya ambil," ujar Mega.

Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Rano Karno menyebut, Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI-P sudah berada di tiga wilayah: Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) untuk membantu korban bencana. "Badan penanggulangan bencana PDI-P sudah berada di Aceh, sudah ada di Sumatera Utara, dan sudah ada di Sumbar. Dan kapal rumah sakit juga sudah berkeliling di sekitar Sumatera," ujar Rano.

Terpisah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons permintaan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri agar menyumbangkan Rp 2 miliar untuk korban bencana Sumatera. Pramono mengatakan akan menjalankan permintaan Megawati tersebut. (wid,ist,ant/dya)

PENDAPATAN SERET, APBN TEKOR RP560,3 T

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit Rp560,3 triliun atau 2,35 persen dari produk domestik bruto (PDB) per November 2025. APBN tekor imbas pendapatan yang masuk ke kas negara seret, baru Rp2.351,5 triliun. Sementara, belanja pemerintah sudah mencapai Rp2.911,8 triliun.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan defisit APBN senilai Rp560,3 triliun pada November 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan nilai defisit tersebut setara dengan 2,35% produk domestik bruto (PDB). "Dengan perkembangan tersebut defisit APBN tercatat sebesar Rp560,3 triliun atau 2,35% terhadap PDB. Ini masih dalam batas yang terkelola," ujarnya di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Secara terperinci, defisit itu timbul akibat belanja negara yang lebih besar dari pembukuan penerimaan negara. Belanja negara sampai dengan akhir November lalu yakni Rp2.911,8 triliun atau 82,5% dari outlook lapsem I/2025 Rp3.527,5 triliun.

Sementara itu, penerimaan negara tercatat terkumpul sebesar Rp2.351,1 triliun atau 82,1% terhadap outlook Rp2.865,5 triliun. Penerimaan pajak yang menyumbang terbesar yakni Rp1.634,4 triliun atau 78,7% terhadap outlook Rp2.076,9 triliun.

Dengan demikian, keseimbangan primer APBN tercatat sebesar minus atau defisit Rp82,2 triliun, atau 74,8% terhadap outlook minus Rp109,9



triliun. Adapun, pada bulan sebelumnya APBN membukukan defisit sebesar Rp479,7 triliun sampai Oktober 2025 atau setara dengan 2,02% dari produk domestik bruto (PDB). Dengan demikian, terdapat selisih Rp80,6 triliun dari defisit November 2025 dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Pendapatan negara mencapai Rp2.113,3 triliun per Oktober 2025. Realisasi itu setara 73,7% dari outlook pendapatan negara sepanjang tahun ini sebesar Rp2.865,5 triliun. Sementara itu, belanja negara sudah

mencapai Rp2.593 triliun per Oktober 2025. Realisasi itu setara 73,5% dari outlook belanja negara sepanjang tahun ini sebesar Rp3.527,5 triliun.

Artinya, belanja negara masih lebih banyak dari pendapatan negara. Oleh sebab itu, defisit APBN mencapai Rp479,7 triliun atau setara 2,02% dari PDB.

Wamen Ungkap Penyebabnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga November 2025 baru mencapai Rp1.634,43

REALISASI APBN PER 30 NOVEMBER 2025

- PENDAPATAN NEGARA:
RP2.351,5 TRILIUN (82,1%)
dari target Outlook Lapsem.
- BELANJA NEGARA
RP2.911,8 TRILIUN (82,5%)
dari target Outlook Lapsem.
- DEFISIT APBN
RP 560,3 TRILIUN (2,35% PDB)
- DEFISIT KESEIMBANGAN PRIMER
RP 82,2 TRILIUN
- PEMBIAYAAN ANGGARAN (Terealisasi)
RP 573,5 TRILIUN.

triliun atau setara 78,7% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp2.189,31 triliun.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak tersebut mengalami penurunan sekitar 3,21%. Pada November 2024, setoran pajak tercatat Rp1.688,64 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan lesunya penerimaan pajak karena tingginya restitusi pajak. Hal tersebut membuat pertumbuhan penerimaan pajak secara neto masih tercatat negatif.

"Selisih antara bruto dan neto adalah namanya restitusi pajak, selisihnya. Yang betul-betul ada cash-nya, artinya yang cash-nya masuk ke cash negara adalah yang Neto," kata Suhasil dalam konferensi pers APBN KiTA Desember 2025, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Pada November 2025, pajak neto tumbuh 2,5 persen secara month on month, membaik dibandingkan Oktober yang hanya tumbuh 0,7 persen dan Agustus yang sempat mencatat kontraksi.

Berdasarkan jenis pajak, realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPhBM sebesar Rp660,77 triliun pada November 2025, atau turun 6,6% dibandingkan November 2024.

"Kalau dibandingkan dengan Oktober itu tumbuh negatifnya 10,3% Jadi ada perbaikan, namun kita tetap berharap bahwa di Desember ini akan terjadi perbaikan yang lebih baik," tuturnya.

Selanjutnya, sejumlah pos masih mengalami penurunan. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara neto tercatat Rp263,58 triliun atau turun 9,0%. PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 mencapai Rp216,31 triliun atau terkontraksi 7,8%.

Suhasil mengatakan, penerimaan dari kategori pajak lainnya secara neto justru mencatatkan kinerja positif. Hingga November 2025, pajak lainnya mencapai Rp 186,33 triliun atau tumbuh 21,5 persen. (wid,bis,ist/dya)

Bahaya Utang Membengkak, Ruang Fiskal Makin Sempit

RUANG fiskal pemerintah makin sempit di tengah tren buruk performa penerimaan pajak tahun 2025. Defisit anggaran telah melebar dibandingkan November tahun 2024. Sementara utang terus mengalami pembengkakan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa total utang pemerintah Indonesia sudah mencapai Rp9.408 triliun sampai dengan akhir kuartal III/2025 atau September 2025. Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto menyebut rasio utang pemerintah sampai dengan akhir kuartal III/2025 itu setara dengan 40,3% terhadap PDB.

"Utang pemerintah outstanding sebesar Rp9.408 triliun itu setara dengan 40,3% Dari PDB, which is ini level yang cukup rendah dibandingkan banyak peer maupun negara-negara secara global, dan tentu ini juga dalam level yang masih aman," terang Suminto pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025).

Adapun dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan utang pemerintah, Suminto menjelaskan bahwa pemerintah memiliki Surat Berharga Negara (SBN). Penerbitan SBN bisa melalui lelang maupun non-lelang. Untuk lelang reguler, lelang surat utang negara (SUN) yang dilakukan 17 Desember 2025 lalu merupakan yang terakhir di tahun ini.

Namun, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tahun ini, pemerintah masih memiliki pengadaan utang termasuk project financing yang penarikan utangnya sesuai dengan perkembangan pelaksanaan proyek terkait. Untuk 2025, sampai dengan akhir November 2025, pembiayaan APBN mencapai Rp573,5 triliun atau 86,63% terhadap outlook laporan semester I/2025 yaitu Rp662 triliun.

Pembiayaan utang yakni mencapai Rp614,9 triliun sampai dengan akhir bulan lalu, sedangkan nonutang minus Rp41,4 triliun. Suminto menjelaskan, kebutuhan pembiayaan APBN tetap di dalam jalur alias on track kendati defisit APBN tahun ini berdasarkan outlook

melebar ke 2,78% terhadap PDB. Sebelumnya, pemerintah menargetkan defisit APBN pada UU APBN 2025 yakni 2,53% terhadap PDB.

"Secara outlook defisit APBN dalam lapsem melebar ke 2,78% PDB dari APBN original 2,53%, namun tidak menyebabkan kebutuhan pembiayaan utang yang lebih besar. Karena pemerintah telah mendapatkan izin dari DPR untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp85,6 triliun," terangnya.

Pada pemberitaan sebelumnya, total outstanding utang pemerintah pusat menembus angka Rp9.138,05 triliun atau hampir menyentuh 40% dari produk domestik bruto alias PDB sampai dengan Juni 2025. Outstanding utang sampai dengan Juni 2025 itu terbagi menjadi utang berasal dari pinjaman Rp1.157,18 triliun, serta penerbitan SBN Rp7.980,87 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap proyeksi ekonomi Indonesia untuk tahun 2026. Menurutnya, pertumbuhan tetap akan terjaga sesuai proyeksi APBN di kisaran 5,4 persen. (wid,ist/dya)

Peringatan PBB: Jakarta dalam Bahaya

Foto udara suasana wilayah bantaran sungai Ciliwung di kawasan Bukit Duri, Jakarta.(dok. ant)



JAKARTA -Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut Jakarta sebagai kota nomor satu di dunia untuk kategori kepadatan penduduk. Dalam laporan World Urbanization Prospects 2025, Jakarta tercatat dihuni hampir 42 juta orang, melampaui total penduduk di Dhaka dan Tokyo.

PBB menyebut lonjakan populasi membuat Jakarta naik dari posisi kedua menjadi pertama. Jakarta menggeser Tokyo, yang sejak 2000 menduduki peringkat pertama kota terpadat dunia. Penduduk Tokyo yang

relatif stabil di angka 33,4 juta mendorong kota itu turun ke posisi tiga.

Adapun Dhaka mencatat lompatan paling agresif, dari posisi kesembilan ke posisi kedua dengan 36,6 juta penduduk. Kota ini bahkan diproyeksikan menjadi yang terbesar di dunia pada 2050.

Pertumbuhan penduduk Dhaka dan Jakarta sama-sama dipicu perpindahan warga dari pedesaan ke perkotaan. Di Bangladesh, migrasi didorong peluang ekonomi dan meluasnya bencana iklim seperti banjir dan naiknya permukaan laut.

Jakarta pun menghadapi ancaman serupa. Sejumlah kajian memperkirakan seperempat wilayah kota dapat berada di bawah air pada 2050 akibat penurunan tanah dan kenaikan muka laut.

Meski pemerintah sedang membangun ibu kota baru di Nusantara, Kalimantan Timur, PBB memperkirakan populasi Jakarta justru akan bertambah 10 juta orang dalam 25 tahun mendatang.

Penduduk Jakarta yang kian banyak juga harus menghadapi tantangan ketimpangan dan keterjangkauan, yang tahun ini sempat memicu ribuan warga turun ke jalan, mencerminkan meningkatnya kemarahan atas kondisi pekerja berpendapatan rendah, termasuk pengemudi ojek dan kurir daring.

PBB mencatat jumlah megacity, kota dengan penduduk lebih dari 10 juta orang, melonjak menjadi 33, atau empat kali lipat dibanding tahun 1975. Asia menjadi episentrum urban terbesar dunia dengan 19 megacity, termasuk sembilan dari 10 kota terpadat.

Satu-satunya kota non-Asia yang masuk 10 besar adalah Kairo, Mesir,

dengan jumlah penduduk 32 juta.

Sementara itu, São Paulo (18,9 juta) menjadi kota terbesar di Amerika, sedangkan Lagos dinobatkan sebagai kota terbesar di Afrika sub-Sahara.

PBB menyebut laporan terbaru ini menggunakan definisi baru untuk menyelaraskan ukuran kota di berbagai negara. Kota kini didefinisikan sebagai aglomerasi berdekatan dari sel grid satu kilometer persegi dengan kepadatan minimal 1.500 orang dan populasi total minimal 50.000.

Metodologi baru ini juga mengubah peringkat sejumlah kota, termasuk Teheran, yang kini tercatat berpenduduk sembilan juta dan tengah menghadapi krisis air serius hingga menerapkan pembatasan distribusi.

Sebelumnya, Data Kependudukan Bersih (DKB) yang bersumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta pada semester I tahun 2025 tercatat mencapai 11.010.514 jiwa.

Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta Denny Wahyu Haryanto mengatakan DKB merupakan data resmi yang telah melalui proses konsolidasi dan validasi secara nasional.(gus,ist/dya)

Pelabuhan Perikanan Tamperan Gelar Sosialisasi Pemeliharaan Kolam Labuh

PACITAN — Pelabuhan Perikanan Tamperan menggelar kegiatan Sosialisasi Pemeliharaan Area Kolam Labuh. Kegiatan ini sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan pemeliharaan kolam labuh tahun 2025.

Program tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan kelancaran operasional pelabuhan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat perikanan di Kabupaten Pacitan.

Sosialisasi disampaikan kepada nelayan, pemilik kapal, pelaku usaha perikanan, serta pengguna jasa pelabuhan lainnya. Materi yang disampaikan mencakup rencana pekerjaan, teknis pelaksanaan, potensi dampak sementara selama proses pemeliharaan, hingga langkah-langkah penyesuaian yang perlu dilakukan agar aktivitas kepelabuhanan tetap berjalan optimal.

Sejumlah pejabat dan unsur terkait turut hadir dalam kegiatan tersebut, di



antaranya Plt Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, Wakil Danlanal Pacitan, perwakilan Kodim Pacitan, Kepala Desa Sidoharjo, Wakapolsek Kota Pacitan, serta para stakeholder dan pengguna jasa Pelabuhan Perikanan Tamperan.

Kehadiran berbagai unsur pemerintah daerah dan aparat kewilayahan ini mencerminkan dukungan penuh terhadap program

pemeliharaan kolam labuh sebagai bagian dari penguatan sarana dan prasarana perikanan di Pacitan.

Pemeliharaan area kolam labuh merupakan agenda rutin yang bertujuan menjaga kedalaman kolam, meningkatkan keamanan, serta menjamin kenyamanan kapal saat sandar maupun melakukan aktivitas bongkar muat. Melalui sosialisasi ini, seluruh pihak diharapkan memahami

tahapan kegiatan, menyiapkan penyesuaian operasional yang diperlukan, serta menjaga koordinasi selama proses pemeliharaan berlangsung.

Pelabuhan Perikanan Tamperan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan dan fasilitas pelabuhan guna mendukung kegiatan perikanan yang aman, tertib, dan berkelanjutan di Kabupaten Pacitan.(adv)



Hindari Jalur Malang Selatan: Proyek Jalan Gondanglegi-Sumawe Baru 50%

MALANG- Progres pengerjaan proyek Jalan Gondanglegi-Sumbermanjing Wetan (Sumawe) di Kabupaten Malang diperkirakan telah mencapai 50 hingga 60 persen.

Mengingat masih ada pekerjaan konstruksi, masyarakat dan wisatawan yang hendak menuju kawasan Malang Selatan pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) diimbau untuk sementara waktu tidak melintasi jalur tersebut.

"Ini kan proyeknya Pemerintah Provinsi Jawa Timur, ya. Sampai sekarang progresnya kurang lebih sudah di angka 50 sampai 60 persen. Tapi kondisi jalan masih belum memungkinkan untuk dilewati. Khususnya kendaraan bertonase besar," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Malang, Khairul Isnaldi Kusuma, Kamis (18/12/2025).

Pria yang akrab dengan sapaan Oong, ini menyampaikan, saat ini pekerjaan masih difokuskan pada pengeprasan badan jalan sebagai bagian dari penyesuaian alignment atau alur jalan vertikal. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk meningkatkan aspek keselamatan

dan kenyamanan pengguna jalan sesuai standar teknis jalan nasional.

"Alignment itu tidak hanya soal horizontal, tikungan dan geometrinya saja, tapi juga ketinggian jalan, turunan, dan tanjakan. Semua harus diperhitungkan supaya aman. Makanya dilakukan pengeprasan," jelasnya.

Menurut Oong, penyesuaian ketinggian jalan juga menjadi pekerjaan krusial agar nantinya kendaraan besar, khususnya bus wisata, dapat melintas dengan aman dan nyaman tanpa risiko kecelakaan.

Meski belum dapat digunakan, Oong optimistis proyek peningkatan kualitas jalan Gondanglegi-Sumawe dapat rampung sesuai target, yakni pada Mei hingga Juni 2026 mendatang.

Optimisme tersebut didasari oleh telah rampungnya sejumlah pekerjaan teknis yang tergolong berat dan kompleks. Mulai dari pekerjaan galian serta pemasangan U-ditch atau saluran air dari beton berbentuk huruf U, yang digunakan untuk sistem drainase di sepanjang ruas jalan tersebut.

"Pekerjaan sulitnya sudah selesai,

terutama drainase. Kalau itu sudah beres, pekerjaan mayor seperti timbunan dan pengaspalan relatif lebih cepat dikejar," terangnya.

Ia menambahkan, dengan selesainya pekerjaan drainase, tahapan pengerjaan berikutnya dinilai tidak akan memakan waktu terlalu lama sehingga target penyelesaian proyek tetap realistis.

Seiring masih berlangsungnya pengerjaan, Oong kembali menegaskan agar masyarakat maupun wisatawan yang hendak bepergian ke kawasan Malang Selatan untuk sementara tidak melintasi jalur Gondanglegi-Sumawe.

Imbauan tersebut dikeluarkan lantaran kondisi jalan yang masih berlumpur dan licin, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan,



Ilustrasi: Pengerjaan perbaikan jalan nasional penghubung Gondanglegi-Balekambang, Kabupaten Malang. (dok. Prokopim Kab Malang)

terutama pada musim hujan.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Dishub. Untuk sementara, jalur alternatif yang disarankan bukan lewat Gondanglegi-Balekambang. Kami khawatir kendaraan bisa terjebak lumpur dan rawan selip," bebernya. (Santi/Dya)

49 Sekolah Kota Malang Bakal Direvitalisasi Pakai Dana APBN di 2026



Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang, Muflikh Adhim. (Santi/Lentera)

MALANG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang menyebut sebanyak 49 sekolah di wilayahnya akan direvitalisasi pada tahun 2026. Program itu sepenuhnya akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jumlahnya lumayan, ya. Mencakup Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), terus ada Taman Kanak-Kanak (TK), termasuk Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) juga," ujar Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang, Muflikh Adhim, Kamis (18/12/2025).

Dijelaskannya, tingkat kerusakan bangunan sekolah yang akan direvitalisasi bervariasi, mulai dari kategori kerusakan menengah, sedang, hingga berat.

"Kerusakannya beragam. Ada yang kategori menengah, sedang, sampai berat. Untuk yang masuk kategori berat, biasanya revitalisasi disertai dengan pembangunan fisik," jelasnya.

Lebih lanjut, Adhim menegaskan revitalisasi sekolah tidak hanya mencakup ruang kelas. Dalam pelaksanaannya, program ini juga dapat mencakup pembangunan atau

perbaikan toilet sekolah, perpustakaan, serta ruang belajar pendukung lainnya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

Terkait mekanisme pengusulan program, Adhim menyebut Disdikbud Kota Malang tidak mengajukan langsung revitalisasi sekolah ke kementerian. Seluruh proses berawal dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang diinput secara mandiri oleh masing-masing sekolah.

"Di Dapodik ada menu kondisi ruang kelas dan sarana prasarana. Dari situ, sekolah menganalisis sendiri tingkat kerusakannya," ungkapnya.

Ia menambahkan, apabila melalui data Dapodik ditemukan ketidaksesuaian komposisi sarana prasarana, seperti rasio jumlah kamar mandi dengan jumlah siswa, maka pemerintah pusat akan memberikan dukungan sesuai kebutuhan yang tercatat.

"Misalnya juga sekolah belum memiliki perpustakaan, nanti bisa diberikan pembangunan

perpustakaan. Semuanya menyesuaikan dengan data kebutuhan di Dapodik," katanya.

Untuk besaran anggaran revitalisasi, Adhim memastikan setiap sekolah menerima nominal yang berbeda-beda. Nilai anggaran tersebut ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan bangunan dan kebutuhan sarana prasarana masing-masing sekolah.

Ia juga menegaskan, kementerian terkait turut melibatkan fasilitator dari sejumlah perguruan tinggi untuk mendampingi sekolah.

"Di Kota Malang, fasilitatornya berasal dari Universitas Negeri Malang (UM), Politeknik Negeri Malang (Polinema), ITN Malang, dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Mereka mendampingi proses penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hingga perhitungan harga," jelas Adhim.

Sementara itu, terkait peran APBD Kota Malang, Adhim mengakui alokasi anggaran daerah untuk revitalisasi sekolah pada tahun 2026 mengalami penurunan. (Santi/Dya)

BUNTUT CUACA EKSTREM, WARGA JEPANG GUGAT PEMERINTAH

Ratusan warga dari berbagai daerah di Jepang mengajukan gugatan terhadap pemerintah pusat pada Kamis (18/12/2025). Mereka menuntut ganti rugi atas pembiaran negara terhadap krisis iklim, yang disebut telah melanggar ketentuan konstitusi. Gugatan ini tercatat sebagai yang pertama di Jepang. Masyarakat secara langsung menyalahkan negara atas lemahnya kebijakan iklim.

Sekitar 450 penggugat menilai sikap pemerintah telah membahayakan kesehatan sekaligus mata pencaharian mereka. Dalam dokumen gugatan yang diperoleh AFP, kebijakan pemerintah Jepang disebut “sangat tidak memadai” dalam merespons krisis iklim yang kian nyata.

Ringkasan gugatan tersebut menyebutkan bahwa kebijakan negara telah melanggar “hak para penggugat untuk menjalani kehidupan yang damai serta menikmati iklim yang stabil.” Gugatan itu telah resmi diterima oleh pengadilan.

Pengacara utama perkara ini, Akihiro Shima, memastikan bahwa seluruh dokumen gugatan beserta bukti pendukung telah diserahkan dan diterima secara resmi oleh pengadilan. “Kami baru saja menyerahkan gugatan dan bukti ke pengadilan, dan perkara ini telah diterima,” ujar Shima kepada AFP.

Ia menegaskan, tujuan utama gugatan ini bukanlah untuk mengejar keuntungan finansial, melainkan untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas kebijakan iklim yang dinilai lalai. Meski demikian, setiap penggugat tetap menuntut ganti rugi simbolis sebesar 1.000 yen, atau



Orang-orang berjalan di bawah sistem kabut air untuk mendinginkan tubuh pada hari yang panas di Tokyo, Jepang pada 6 September 2025. (AFP/Getty Images)

sekitar Rp 107.206.

Salah satu penggugat, Kiichi Akiyama (57), seorang pekerja konstruksi, mengungkapkan dampak langsung gelombang panas ekstrem terhadap pekerjaannya. Menurutnya, suhu yang terus meningkat memaksa timnya memperlambat ritme kerja, sehingga memicu kerugian ekonomi yang signifikan.

“Panas yang terus-menerus membuat kami harus bekerja lebih lambat, dan itu menimbulkan kerugian besar,” kata Akiyama.

Ia juga menyoroti ancaman serius terhadap kesehatan para pekerja. “Ada orang yang pingsan di lokasi kerja,

bahkan ada yang meninggal setelah pulang ke rumah,” ujarnya.

Akiyama menambahkan, durasi pengerjaan proyek kini bisa membengkak hingga tiga kali lipat dari perkiraan awal. “Saya hampir tidak bisa menggali dengan sekop selama 10 menit tanpa harus duduk untuk beristirahat,” tuturnya. “Kami tidak akan berada dalam kondisi seburuk ini jika pemerintah lebih proaktif dalam menerapkan kebijakan,” lanjutnya.

Terpanas Sejak 1898

Para penggugat mengaitkan kerugian ekonomi, gagal panen, serta

Data Tren Kenaikan Suhu Rata-Rata (Anomali)

Tahun 2021:
Anomali suhu sebesar +0,54°C dengan status Hangat.

Tahun 2022:
Anomali suhu sebesar +0,60°C dengan status Sangat Hangat.

Tahun 2023:
Anomali suhu sebesar +1,29°C dengan status Rekor Tertinggi (sebelumnya).

Tahun 2024:
Anomali suhu sebesar +1,35°C dengan status Rekor Baru.

Tahun 2025:
Anomali suhu sebesar +2,36°C dengan status Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah.

meningkatnya risiko sengatan panas dengan gelombang panas ekstrem yang melanda Jepang. Negara itu sendiri mencatat musim panas terpanas tahun ini sejak pencatatan suhu dimulai pada 1898.

Masako Ichihara, profesor asisten di Universitas Kyoto, menjelaskan bahwa sebelumnya sudah ada lima gugatan terkait isu iklim di Jepang, termasuk yang menargetkan pembangkit listrik tenaga batu bara. Namun, ia menegaskan bahwa gugatan kali ini merupakan yang pertama yang secara langsung menuntut kompensasi dari negara terkait perubahan iklim.

“Kasus ini lebih berani dibandingkan gugatan-gugatan sebelumnya karena secara langsung meminta pertanggungjawaban negara atas pembiaran iklim,” ujar Ichihara.

Meski demikian, ia menilai peluang kemenangan di pengadilan relatif kecil. Namun, dari sisi peningkatan kesadaran publik, gugatan ini berpotensi efektif karena pesannya “sangat mudah dipahami dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.”

Penggugat lain, Saito, yang hanya menyebutkan nama keluarganya, mengatakan bahwa gugatan ini ia ajukan demi masa depan putranya yang berusia enam tahun. Ia mengeluhkan suhu ekstrem yang membuat anaknya semakin sulit bermain di luar rumah.

“Bukan hanya di kolam renang, bermain di luar ruangan secara umum kini semakin sulit saat musim panas. Peralatan di taman bermain terasa membara dan itu menakutkan,” kata Saito kepada AFP.gus,afp,ist/dya)

Demo PM Sanae Takaichi, Tolak Lonjakan Anggaran Pertahanan

RATUSAN tokoh politik dan warga Jepang menggelar aksi unjuk rasa di Tokyo, Rabu (18/12/2025) malam, sebagai bentuk penolakan terhadap lonjakan belanja pertahanan Jepang serta menuntut Perdana Menteri Sanae Takaichi mencabut pernyataannya yang dinilai keliru terkait Taiwan.

Aksi tersebut dipicu oleh pernyataan Takaichi dalam sidang Parlemen Jepang (Diet) pada awal November lalu. Dalam forum tersebut, Takaichi menyebut bahwa penggunaan kekuatan oleh China daratan terhadap Taiwan dapat dikategorikan sebagai “situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang”, sekaligus mengisyaratkan kemungkinan intervensi bersenjata Jepang di Selat Taiwan.

Pernyataan ini menuai kritik keras, baik di dalam negeri maupun dari komunitas internasional.

Dalam aksi unjuk rasa, para demonstran mengedarkan spanduk pernyataan perdana menteri

tersebut. Mereka menilai sikap itu menyimpang dari posisi resmi pemerintah Jepang selama ini, merusak fondasi hubungan Jepang-China, serta berpotensi menyeret Jepang ke dalam konflik militer.

“Pernyataan itu hampir setara dengan deklarasi perang. Hal ini menginjak-injak seluruh kesepakatan yang telah dicapai Jepang dan China hingga saat ini. Jika benar-benar terjadi, dampaknya akan menimbulkan korban jiwa yang sangat besar di kedua negara,” ujar anggota Majelis Tinggi Parlemen Jepang, Yamazoe Taku, dalam orasinya.

Ia menambahkan bahwa pernyataan Takaichi bertentangan dengan sikap konsisten pemerintahan-pemerintahan Jepang sebelumnya dan hingga kini belum juga ditarik kembali. “Ini persoalan serius. Selain berdampak pada perekonomian, pernyataan tersebut bisa memicu konflik bersenjata. Saya mendesak Perdana Menteri Takaichi

segera mencabut ucapannya. Jika tidak, pemerintahan koalisi Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Inovasi Jepang (JIP) tidak lagi layak menentukan masa depan Jepang,” tegasnya.

Di tengah kontroversi tersebut, Majelis Tinggi Parlemen Jepang pada Selasa (17/12/2025) mengesahkan anggaran tambahan tahun fiskal 2025 yang mendorong belanja pertahanan Jepang ke rekor tertinggi.

Dalam anggaran tambahan itu, pemerintah mengalokasikan dana tambahan sebesar 1,1 triliun yen atau sekitar 7,7 miliar dolar AS untuk sektor pertahanan. Jika digabungkan dengan anggaran pertahanan yang telah disetujui sebelumnya sebesar 9,9 triliun yen (sekitar 69,2 miliar dolar AS), total belanja pertahanan Jepang pada tahun fiskal 2025 mencapai sekitar 11 triliun yen atau setara 77 miliar dolar AS, atau sekitar 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Jepang. (ist,afp/dya)

BENARKAH POLA MAKAN BISA 'DISUPERDAYAKAN' UNTUK DONGKRAK IMUN? INI KATA AHLI BIOMEDIS

Setiap kali musim hujan tiba atau suhu udara mulai menurun, berbagai nasihat tentang menjaga daya tahan tubuh bermunculan dari segala arah. Ada yang menyarankan memperbanyak konsumsi jeruk, ada pula yang menganjurkan minum satu sendok madu setiap hari, hingga larangan keluar rumah malam-malam agar tidak terserang flu dan pilek. Namun, di balik maraknya saran tersebut, muncul satu pertanyaan penting, benarkah pola makan tertentu mampu 'disuperdayakan' untuk tingkatan sistem kekebalan tubuh?

Pertanyaan ini coba dijawab secara ilmiah oleh Dr Gareth Nye, dosen dan pakar ilmu biomedis dari University of Salford, Inggris. Dalam keterangannya kepada Daily Mirror, Dr Nye mengulas secara rinci hubungan antara pola makan dan sistem imun, sekaligus meluruskan berbagai kesalahpahaman yang kerap beredar di masyarakat.

Sistem Imun Tidak Bisa 'Disupercharge'

Menurut Dr Nye, pandangan ilmiah secara umum sepakat bahwa pola makan sehat dan beragam sangat penting untuk mendukung kerja sistem imun agar tetap optimal. Asupan nutrisi yang tidak memadai dapat menyebabkan imunodefisiensi, yaitu kondisi ketika tubuh menjadi lebih rentan terserang penyakit karena sistem pertahanannya melemah. Namun, ia menekankan satu hal krusial yang sering disalahpahami.

"Sistem imun tidak bisa 'disuperdayakan' atau 'ditingkatkan' melampaui fungsi normalnya. Yang bisa kita lakukan hanyalah memastikan sistem imun bekerja seoptimal mungkin sesuai kapasitas alaminya," jelas Dr Nye.

Dengan kata lain, tidak ada makanan atau minuman ajaib yang dapat membuat seseorang sepenuhnya kebal terhadap penyakit. Meski demikian, pola makan yang kaya nutrisi tetap berperan penting karena menyediakan bahan baku utama yang dibutuhkan sel-sel imun untuk bekerja efektif dalam melawan infeksi.

Dalam penjelasannya, Dr Nye menyoroti empat

jenis vitamin utama yang memiliki peran signifikan dalam mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh, yakni vitamin C, A, D, dan E.

Vitamin C menjadi salah satu yang paling dikenal masyarakat. Nutrisi ini banyak ditemukan dalam buah-buahan seperti jeruk dan stroberi, serta sayuran hijau dan berwarna cerah seperti brokoli, paprika, dan kubis Brussel.

Pandangan ini sejalan dengan keterangan NHS (National Health Service Inggris) yang menyebutkan bahwa vitamin C tidak hanya berfungsi melindungi sel tubuh, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit, pembuluh darah, tulang, dan tulangrawan.

Tak hanya vitamin C, vitamin A, D, dan E juga memegang peranan yang tidak kalah penting. Vitamin D, misalnya, menjadi perhatian khusus pada musim dingin karena produksi alaminya dalam tubuh sangat bergantung pada paparan sinar matahari, yang cenderung berkurang pada periode tersebut.

"Vitamin C, A, D, dan E berperan dalam mengatur respons sistem imun,

membantu proses perbaikan jaringan, serta menjaga kesehatan sistem pernapasan," ujar Dr Nye. "Vitamin-vitamin ini juga memiliki sifat antioksidan yang membantu sel tubuh mengendalikan peradangan dan dampak negatifnya." Ia menambahkan, ketika seseorang sedang sakit, tubuh sangat membutuhkan asupan makanan yang kaya buah dan sayuran. Sebaliknya, makanan ultra-proses sebaiknya dihindari. Meski demikian, kebiasaan makan sehat ini tidak hanya bermanfaat saat sakit, tetapi juga penting sebagai langkah pencegahan agar tubuh tidak mudah terserang penyakit sejak awal.

Bagaimana dengan madu yang kerap disebut sebagai obat alami untuk flu dan pilek? Dr Nye menjelaskan bahwa madu kemungkinan besar tidak mampu mencegah seseorang tertular flu atau pilek, tetapi terdapat bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa madu dapat

membantu meredakan gejala jika seseorang sudah terlanjur sakit. Sebuah tinjauan penelitian pada tahun 2020 terhadap 14 studi yang melibatkan hampir 1.800 penderita infeksi saluran pernapasan atas menemukan bahwa konsumsi madu dapat memperbaiki gejala dan bahkan memperpendek durasi sakit hingga satu atau dua hari pada beberapa kasus.

Flu dan Pilek Bukan karena Dingin

Dalam kesempatan yang sama, Dr Nye juga meluruskan anggapan umum bahwa flu dan pilek disebabkan oleh udara dingin. Faktanya, kedua penyakit tersebut disebabkan oleh virus, bukan oleh suhu udara. Cuaca dingin memang dapat membuat tubuh lebih rentan mengalami gejala dan mempermudah penyebaran virus. Namun, faktor utamanya justru berkaitan dengan kebiasaan manusia yang lebih sering berada di dalam ruangan dalam waktu lama.

Pola makan skarena itu, ia menyarankan beberapa langkah sederhana namun penting. Harus dipastikan asupan cairan yang cukup untuk mencegah dehidrasi dan penumpukan lendir. Kemudian mengusahakan tetap mendapatkan udara segar bila memungkinkan. Menjaga kebersihan tangan dengan rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air hangat. Dr Nye menegaskan bahwa menjaga sistem imun bukan soal mencari satu jenis makanan atau suplemen yang dianggap paling ampuh, melainkan tentang konsistensi menjalani gaya hidup sehat. eimba .(mir,ist/dya)



BERKACA DARI KEBAKARAN TERRA DRONE CATAT CARA AMAN SIMPAN BATERAI LITUM

Peristiwa kebakaran gedung Terra Drone di Kemayoran pada 9 Desember 2025 menjadi alarm serius bagi sektor perkantoran di Indonesia. Insiden tersebut dipicu oleh ledakan baterai litium-ion di lantai dasar yang kemudian memicu kobaran api besar dan cepat meluas. Sebanyak 22 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara upaya penyelamatan terhambat oleh kepulan asap tebal serta minimnya akses jalur evakuasi. Tragedi ini menegaskan pentingnya penerapan standar keselamatan, khususnya dalam penyimpanan baterai litium di lingkungan kantor maupun area lain di dalam gedung.

Insiden Terra Drone menyoroti satu fakta penting, baterai litium yang salah penanganan dapat berubah menjadi ancaman mematikan. Di kantor yang menyimpan banyak perangkat seperti laptop, drone, e-bike, hingga UPS mini, risiko kebakaran meningkat bila tidak ada prosedur penyimpanan dan pengisian yang benar. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut panduan cara aman menyimpan dan mengisi

daya baterai litium di perkantoran, berdasarkan rekomendasi ahli keselamatan dan standar industri.

Simpan di Lokasi Khusus yang Aman

Perusahaan sangat dianjurkan menyediakan ruang penyimpanan khusus dengan kontainer tahan api atau insulated storage. Ruangan ini sebaiknya

berada jauh dari area kerja utama untuk meminimalkan risiko jika terjadi ledakan.

Baterai litium wajib disimpan di ruangan

Kering, sejuk, dan berventilasi baik, ideal di suhu 10–35°C. Jauh dari paparan sinar matahari langsung atau sumber panas. Tidak dekat bahan mudah terbakar seperti kertas, kardus, atau kain.

Isi Daya pada Level yang Tepat Sebelum Disimpan

Kebiasaan sederhana ini dapat mencegah overdischarge yang merusak sel baterai dan meningkatkan risiko thermal runaway.

Untuk penyimpanan jangka panjang:

Isi baterai pada 40–60% untuk menjaga stabilitas kimia, jangan disimpan dalam kondisi kosong atau penuh 100%. Periksa kondisi baterai setiap 3–6 bulan, lalu isi ulang jika diperlukan.

Gunakan Charger Asli dan Area Charging Khusus

Penggunaan charger murah atau tidak standar sering menjadi pemicu arus pendek dan overheating. Pengisian daya adalah momen paling rawan kebakaran.

Pastikan kantor menerapkan aturan berikut

Gunakan charger asli atau yang tersertifikasi sesuai spesifikasi pabrikan. Lakukan pengisian di area khusus dengan ventilasi baik dan

jauh dari material mudah terbakar. Jangan mengisi daya semalaman tanpa pengawasan. Lepaskan baterai dari perangkat jika tidak digunakan dalam waktu lama.

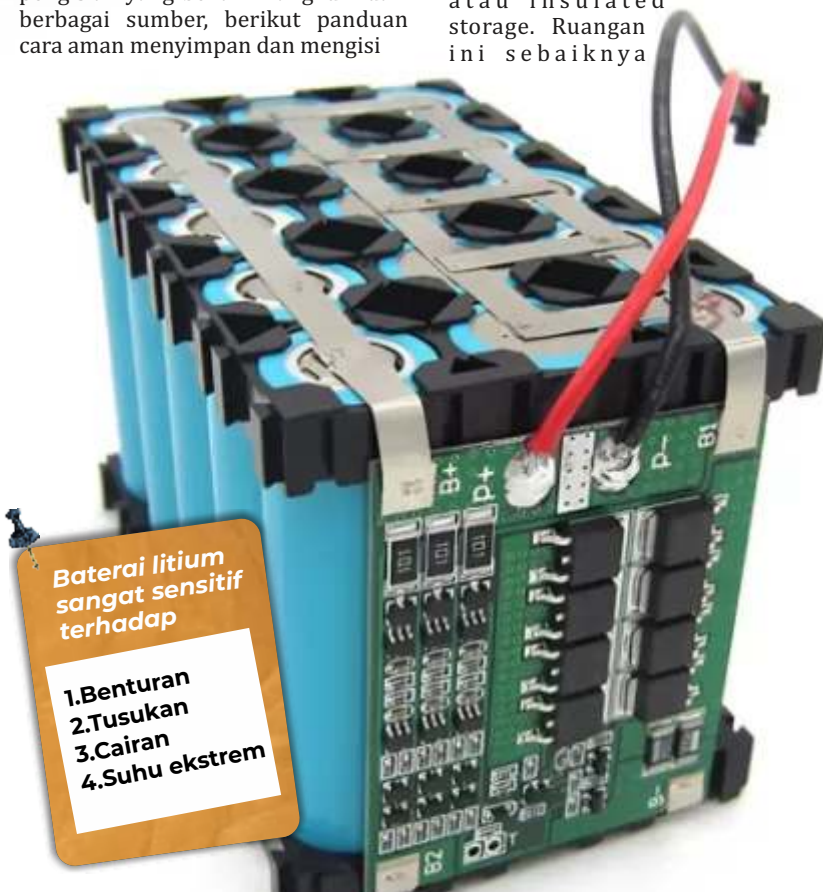
Lindungi Baterai dari Kerusakan Fisik

Di lingkungan kantor, terapkan prosedur penanganan seperti menggunakan sarung tangan, memastikan baterai tidak terjatuh, serta menyimpan baterai cadangan dalam wadah khusus. Perkantoran juga wajib menyediakan APAR khusus baterai litium seperti dry chemical atau CO2 karena air justru dapat memperburuk kebakaran yang berasal dari reaksi kimia internal baterai.

Latih Karyawan dan Siapkan Protokol Darurat

Kesalahan manusia sering menjadi pemicu terbesar insiden. Penting melakukan edukasi seluruh karyawan mengenai tanda baterai rusak: mengembung, mengeluarkan panas berlebih, berbau kimia, atau berubah bentuk. Lakukan sosialisasi jalur evakuasi dan latihan rutin. Pastikan sediakan alat keselamatan seperti selimut tahan api, detektor asap, hingga alarm otomatis di ruang penyimpanan baterai.

Dalam insiden Terra Drone, asap tebal dari baterai litium membuat evakuasi sangat sulit, menegaskan bahwa sistem keselamatan harus dipersiapkan sebelum bencana terjadi. Menurut penjelasan di situs Terra Drone, ada dua jenis baterai yang digunakan untuk drone agrikultur, yakni Lithium Polymer (LiPo) dan Lithium-ion (Li-ion). (ist/dya)



Baterai litium sangat sensitif terhadap

1. Benturan
2. Tusukan
3. Cairan
4. Suhu ekstrem



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH I **LAMONGAN:** L HANDI I **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA I **KEDIRI:** GATOT SUNARKO I **JOMBANG:** SUTONO I **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO I **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO I **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN I **TRENGGALEK:** TINA W I **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN I **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN I **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN I **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 I **TELP** 03187854491 I **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I **TELP IKLAN** 031-87854491 I **NIB** 91205006801134 I **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Menikmati Pesona Pawon Purba di Desa Wisata Nglanggeran

Perjalanan menuju kaki Gunung Api Purba Nglanggeran bukan sekadar wisata alam biasa. Di kawasan inilah pengunjung dapat merasakan pengalaman utuh. Mulai dari menyusuri jejak geologi purba, menikmati lanskap pedesaan yang menenangkan, sekaligus mencicipi kuliner tradisional yang lahir dari kearifan lokal. Salah satu simpul penting pengalaman itu adalah Pawon Purba, sebuah destinasi wisata kuliner yang menyatu dengan denyut kehidupan Desa Wisata Nglanggeran, desa yang kerap disebut sebagai contoh praktik pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memilih kawasan ekowisata Nglanggeran, Gunungkidul, menjadi percontohan untuk pengembangan hutan lain sebagai kawasan ekoeuwisata.

Tata kelola di Nglanggeran akan diadaptasi dan disusun menjadi grand design ekoeuwisata. Grand design ini akan digunakan untuk mengembangkan tiga Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), yaitu KHDTK Pondok Buluh Sumatera Utara, KHDTK Sawala Mandapa Jawa Barat, dan KHDTK Tabo-Tabo Sulawesi Selatan. Hal itu tak berlebihan mengingat Desa Wisata Nglanggeran memang merupakan potret pariwisata berkelanjutan.

Desa Nglanggeran, yang berada di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, telah lama dikenal sebagai desa wisata unggulan. Letaknya di kawasan perbukitan karst menjadikan desa ini kaya akan panorama alam sekaligus nilai geologis. Ikon utamanya, Gunung Api Purba Nglanggeran, terbentuk sekitar 60 juta tahun lalu dan kini menjadi situs geowisata penting di Yogyakarta. Pendakian menuju puncak Gunung Gedhe, salah satu titik tertinggi

di kawasan ini, menyuguhkan pengalaman yang tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga mengajak pengunjung memahami perjalanan panjang bumi. Bebatuan raksasa, jalur setapak alami, serta vegetasi yang tumbuh di sela-sela batuan vulkanik menjadi saksi bisu proses geologi yang berlangsung jutaan tahun.

Namun, Nglanggeran bukan semata soal gunung. Desa ini hidup dari harmoni antara alam dan manusia. Warganya menjaga tradisi, mengelola lingkungan, dan membuka rumah mereka sebagai homestay bagi wisatawan yang ingin merasakan kehidupan desa secara autentik. Dari sinilah konsep pariwisata berbasis masyarakat menemukan bentuknya nyata.

Di tengah suasana desa yang asri itu, Pawon Purba hadir sebagai ruang pertemuan antara rasa, tradisi, dan lanskap alam. Lebih dari sekadar tempat makan, Pawon Purba adalah representasi dapur tradisional Jawa yang dihidupkan kembali dalam konteks wisata kekinian. Begitu memasuki area Pawon Purba, pengunjung langsung disambut bangunan berkonsep joglo dengan dominasi material kayu. Tata ruangnya sederhana namun hangat, mengingatkan pada pawon yaitu dapur tradisional di rumah-rumah Jawa tempo

dulu. Dari tempat duduk pengunjung, hamparan sawah terasering dan siluet Gunung Api Purba menjadi latar alami yang menenangkan. Suasana pedesaan yang tenang inilah yang membuat Pawon Purba kerap dipilih sebagai destinasi wisata keluarga. Anak-anak dapat bermain di ruang terbuka, orang tua menikmati hidangan, sementara seluruh anggota keluarga merasakan ritme hidup desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota.

Nasi Tiwul dan Tempe Garit

Daya tarik utama Pawon Purba terletak pada menu yang mengangkat kuliner khas Gunungkidul. Nasi tiwul, olahan ketela pohon yang dahulu menjadi pangan pokok masyarakat, menjadi sajian favorit. Teksturnya kenyal dengan rasa gurih alami, berpadu serasi dengan lauk sederhana seperti tempe garit, mendoan, dan sayur lodeh. Kesederhanaan menu justru menjadikannya istimewa.

Bahan-bahan yang digunakan berasal dari hasil pertanian lokal, diolah dengan resep turun-temurun. Cita rasa yang dihasilkan bukan sekadar soal lezat, tetapi juga menghadirkan memori kolektif tentang dapur desa dan kebersamaan. Untuk melengkapi santapan, tersedia minuman tradisional seperti wedang uwuh dan beras kencur.

Aroma rempah yang hangat dari wedang uwuh terasa pas dinikmati di udara sejuk Nglanggeran, sementara beras kencur memberi kesegaran setelah aktivitas menjelajah alam. Harga makanan di Pawon Purba relatif terjangkau, menjadikannya inklusif bagi berbagai kalangan. Inilah salah satu prinsip penting pariwisata berkelanjutan yang diusung desa: manfaat ekonomi dapat dirasakan luas oleh masyarakat.

Yang membedakan Pawon Purba dari banyak tempat makan lainnya adalah pengalaman yang ditawarkan. Pengunjung dapat melihat langsung proses pengolahan makanan, dari dapur terbuka hingga penyajian. Interaksi dengan warga yang memasak menciptakan kedekatan emosional—makan tidak lagi menjadi aktivitas pasif, melainkan pengalaman budaya.

Selain bersantap, pengunjung dapat berfoto di berbagai sudut yang dirancang alami dan estetik, membeli oleh-oleh khas Gunungkidul, atau sekadar duduk menikmati suasana desa. Bagi sebagian wisatawan, momen-momen sederhana inilah yang justru paling berkesan. Kunjungan ke Pawon Purba idealnya menjadi bagian dari perjalanan yang lebih luas di Desa Nglanggeran. (ist/dya)



Bertubi-tubi! KPK ...dari hal 1

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Banten dan Jakarta pada Rabu malam, 17 Desember 2025. Dalam operasi tersebut, lembaga antirasuah ini mengamankan oknum jaksa dan pengacara yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa hingga saat ini tim penyidik telah mengamankan sebanyak 9 orang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Mereka terdiri dari oknum jaksa berinisial RZ, dua orang penasihat hukum dan enam orang lainnya dari pihak swasta.

"Tim mengamankan sejumlah sembilan orang di wilayah Banten dan Jakarta," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025).

Sebelumnya, KPK sempat mengamankan 10 orang, namun satu orang yang merupakan kerabat dari salah satu pihak yang ditangkap telah diperbolehkan pulang pada Kamis pagi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari penelusuran di lapangan menyebutkan bahwa oknum jaksa RZ diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap WNA. Namun KPK enggan memerinci konstruksi perkara, kronologi, serta rincian peran masing-masing pihak. KPK menyebut akan mengumumkannya melalui konferensi pers.

Selain menangkap sembilan orang, penyidik juga menyita barang bukti uang dalam bentuk tunai sekitar Rp900 juta. "Selain mengamankan sembilan orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, sejumlah uang dalam bentuk tunai, sekitar Rp900 juta," ungkap Budi.

Hingga saat ini, penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan intensif untuk menentukan status hukum dari kesembilan orang tersebut. Berdasarkan prosedur hukum, KPK memiliki waktu 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status tersangka.

Sementara dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan KPK sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait dengan operasi tangkap tangan tersebut. Koordinasi dilakukan karena ada oknum jaksa yang ikut terjaring OTT.

"Seperti sudah disampaikan oleh Jubir KPK bahwa memang ada pengamanan terhadap oknum jaksa. Sudah ada koordinasi dengan Kejaksaan Agung," ujar Fitroh.

OTT KPK di Banten menambah daftar operasi tangkap tangan yang dilakukan lembaga antirasuah sepanjang tahun 2025. Pada Maret 2025, KPK melakukan OTT dengan

menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

Selanjutnya, pada Juni 2025, KPK menggelar OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara serta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

OTT berikutnya dilakukan pada 7-8 Agustus 2025 di Jakarta, Kendari, Sulawesi Tenggara, dan Makassar, Sulawesi Selatan, terkait dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Pada 13 Agustus 2025, KPK kembali melakukan OTT di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Selanjutnya, pada 20 Agustus 2025, KPK menggelar OTT terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di

Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu.

Pada 3 November 2025, KPK melakukan OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025.

Kemudian, pada 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, terkait dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di RSUD dr. Harjono Ponorogo, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Terakhir, pada 9-10 Desember 2025, KPK menangkap Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, terkait dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025

KPK juga melakukan operasi



Eks Wamenaker, Immanuel Ebenezer atau Noel, jelang pelimpahan tahap II kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 Kemnaker, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/12/2025). Foto: Dok. Istimewa

Update Pemerasan Kasus K3 Kemnaker KPK: Capai Rp 201 M, Libatkan Noel Ebenezer Dkk

KPK mengungkapkan bahwa kasus dugaan pemerasan yang melibatkan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel dkk, mencapai Rp 201 miliar.

Adapun Noel dijerat sebagai tersangka bersama 10 orang lainnya terkait kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker.

"Dalam penyidikan perkara ini, dari identifikasi oleh penyidik melalui rekening para tersangka, dugaan tindak pemerasan yang dilakukan mencapai Rp 201 miliar untuk periode 2020-2025," ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Kamis (18/12/2025).

"Jumlah tersebut belum termasuk pemberian tunai ataupun dalam bentuk barang seperti mobil, motor,

fasilitas pemberangkatan ibadah haji, umrah, dan lain-lain," jelas dia.

Adapun pada Kamis, KPK telah melimpahkan tersangka dan barang bukti atau tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Hari ini, penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, telah dinyatakan lengkap atau P21, dan limpah ke tahap penuntutan," ucap Budi.

"Di mana penyidik telah selesai melaksanakan proses tahap II, dengan penyerahan barang bukti dan 11 orang tersangka kepada tim Jaksa Penuntut Umum (JPU)," imbuhnya.

Dengan pelimpahan itu, kata Budi, JPU selanjutnya akan menyusun surat dakwaan dan Noel dkk akan segera disidang.

"Selanjutnya, JPU memiliki waktu

tangkap tangan (OTT) di wilayah Bekasi, Jawa Barat (Jabar). Ruang kerja Bupati Bekasi turut disegel.

Dilansir Antara, Kamis (18/12/2025), tiga orang penyidik KPK menyegel dua akses pintu ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang pada hari ini pukul 19.00 WIB.

"Tiga orang pakai masker semua, masuk menunjukkan identitas KPK," kata petugas sekuriti Gedung Bupati Bekasi.

Ketiga orang itu langsung naik ke lantai dua menuju ruang kerja Bupati Bekasi. Mereka keluar setengah jam kemudian dengan posisi dua pintu sudah tersegel.

Tidak ada yang tahu perginya ketiga penyidik KPK tersebut. Diduga mereka meninggalkan gedung Bupati Bekasi melalui akses samping yang terkoneksi dengan gedung lain.

Sebelumnya, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Ada 10 orang yang ditangkap.

"Benar, sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup di lapangan. Masih berproses," kata jubir KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan.

"Sampai dengan saat ini, tim sudah mengamankan sekitar sepuluh orang," tambahnya.

Belum dirincikan KPK siapa saja pihak-pihak yang diamankan tersebut. KPK punya waktu 1x24 jam untuk mengumumkan status para pihak yang terjaring OTT.(tin,tmo,ini/dya)

paling lama 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan. Untuk kemudian, berkas perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) guna proses persidangan," tutur Budi.

Adapun usai pelimpahan itu, Noel menyebut dirinya bersama tersangka lain tinggal menunggu jadwal persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Noel mengaku siap menghadapi proses itu. Hal itu disampaikan Noel saat tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (18/12/2025). Noel terlihat datang menggunakan syal putih dilengkapi kopiah hitam di kepalanya.

"Harus siap lah (P21 hari ini). Masa nggak siap. Petarung di mana pun harus siap," ujar Noel di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025).

Menurut Noel, kasus korupsi yang dituduhkan kepadanya tidak memenuhi unsur adanya kerugian keuangan negara. Namun, Noel tak merinci lebih jauh terkait hal ini. "Enggak lah, ya masa ada kerugian negaranya," sambung dia. (gus,kun,ant/dya)

JIMLY: TAK ADA LAGI PENUGASAN BARU POLISI DI LUAR POLRI!

Komisi Percepatan Reformasi Polri memastikan tidak akan ada lagi penugasan baru anggota Polri ke kementerian dan lembaga (K/L) setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Komisi Reformasi Polri. Meski demikian dia mengaku kaget, saat Kapolri menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur soal penempatan anggota polisi aktif pada 17 kementerian/lembaga. Padahal, komisi tersebut dibentuk secara resmi oleh Presiden untuk mengawal agenda reformasi di tubuh Polri.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengatakan Kapolri bersama Wakapolri telah menegaskan komitmen Polri untuk mematuhi putusan MK yang melarang anggota kepolisian aktif menduduki jabatan sipil, kecuali setelah pensiun atau mengundurkan diri.

"Itu sudah disampaikan oleh Pak Kapolri dan juga tadi Pak Wakapolri, pengangkatan baru tidak ada lagi. Pokoknya setelah putusan MK itu tidak akan ada lagi, menunggu aturan yang pasti ke depan," kata Jimly kepada wartawan di Posko Komisi Reformasi, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025).

Penegasan tersebut sekaligus merespons polemik yang muncul setelah diterbitkannya Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025. Aturan itu sempat menuai sorotan publik karena dinilai bertentangan dengan putusan MK.

Namun Jimly menilai Perpol 10/2025 tidak dimaksudkan untuk melawan putusan MK. Ia menyebut regulasi tersebut disusun sebagai langkah transisi untuk mengatur anggota Polri yang sudah lebih dulu menduduki jabatan di kementerian



dan lembaga sebelum putusan MK dibacakan.

"Bukan salahnya polisi, dia dibutuhkan. Nah inilah yang dimaksudkan oleh perpol itu untuk mengatur. Dia menjalankan putusan MK, cuma ada kekurangannya," jelas Jimly.

Kekurangan yang dimaksud, lanjut Jimly, terletak pada bagian pertimbangan Perpol yang belum mencantumkan putusan MK sebagai dasar hukum. Kondisi itu memunculkan persepsi seolah Polri mengabaikan putusan lembaga

konstitusi tersebut.

"Tadi saya sudah sebut tapi ini bukan hanya polisi, kalau membuat peraturan, sering dalam pertimbangan tidak semua ada putusan MK. Menimbang, mengingat Undang-Undang Polri nomor sekian lembaran negara nomor sekian, titik (tidak ada putusan MK)," ungkapnya.

"Seolah-olah undang-undang yang dijadikan rujukan undang-undang lama yang belum berubah karena putusan MK. Jadi orang menafsirkan, wah ini membangkang terhadap putusan MK. Padahal itu, apa

Namanya, kekeliruan yang lazim di mana-mana, semua kementerian," lanjut Jimly. (wid, ini, ist, dya)

ATURAN POLRI VS PUTUSAN MK

ATURAN POLRI (Perpol No. 10 Tahun 2025)

OBJEK ATURAN
Mengatur penugasan anggota Polri aktif di luar struktur organisasi Polri.

STATUS ANGGOTA
Polisi tetap berstatus anggota aktif Polri, tetapi melepaskan jabatan struktural di lingkungan kepolisian.

RUANG PENUGASAN
Penugasan dapat dilakukan di dalam maupun luar negeri.

LEMBAGA TUJUAN PENUGASAN
Polisi aktif dapat mengisi jabatan di 17 kementerian/lembaga, antara lain:

1. Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan
2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Kementerian Hukum
4. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
5. Kementerian Kehutanan
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. Kementerian Perhubungan
8. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
10. Lembaga Ketahanan Nasional
11. Otoritas Jasa Keuangan
12. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
13. Badan Narkotika Nasional (BNN)
14. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
15. Badan Intelijen Negara (BIN)
16. Badan Siber Sandi Negara (BSSN)
17. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

JENIS JABATAN
Penugasan dapat dilakukan pada jabatan manajerial dan nonmanajerial.

SYARAT JABATAN
Jabatan yang diisi harus: Berkaitan langsung dengan fungsi kepolisian
Didasarkan pada permintaan resmi kementerian/lembaga terkait

LANDASAN WAKTU
Ditetapkan Kapolri pada 9 Desember 2025, diundangkan 10 Desember 2025.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Perkara No. 114/PUU-XXIII/2025)

OBJEK PUTUSAN
Penugasan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

POKOK PUTUSAN
Anggota Polri tidak boleh menduduki jabatan sipil selama masih berstatus polisi aktif.

SYARAT MUTLAK
Polisi hanya boleh menjabat jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

LARANGAN IZIN INTERNAL
Penempatan anggota Polri di jabatan nonkepolisian tidak bisa dilakukan hanya dengan izin Kapolri.

PENEGASAN KONSTITUSIONAL
Status "mengundurkan diri atau pensiun" merupakan syarat wajib, bukan pilihan administratif.

PERTIMBANGAN HAKIM
Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menegaskan bahwa frasa "mengundurkan diri atau pensiun" dalam UU Polri tidak boleh ditafsirkan longgar.

Menkum Ingatkan Publik Semakin Kritis

MENTERI Hukum Supratman Andi Agtas tak menampik terdapat polemik antara Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Nomor 10 Tahun 2025 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Namun, menurut dia, permasalahan tersebut merupakan hal yang lumrah lantaran hanya sebuah perbedaan pendapat.

Meski begitu, Supratman menuturkan pemerintah dan DPR akan menyesuaikan dinamika yang berkembang dalam pembahasan Perpol tersebut. "Apalagi percayalah, semakin hari publik semakin kritis," kata Supratman dalam Konferensi Pers Refleksi Akhir Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Supratman mengatakan rencana menjadikan Perpol Nomor 10 Tahun 2025 sebagai salah satu materi penyusunan draf revisi Undang-Undang tentang Polri masih akan

dibahas terlebih dahulu.

Ia menegaskan perpol tentang pelaksanaan tugas anggota Polri di luar struktur organisasi Polri, terutama di 17 kementerian/lembaga, tersebut harus diatur, baik dalam UU maupun peraturan di bawahnya.

"Kemarin sudah disampaikan sama Pak Kapolri kan. Hasil rekomendasi dari tim reformasi Polri juga dalam UU maupun peraturan di bawahnya," ujar Supratman.

Sebelumnya, Komisi Percepatan Reformasi Polri mengusulkan agar hal-hal yang berkaitan dengan penugasan anggota Polri di kementerian/lembaga diatur dengan mekanisme Omnibus Law.

"Kami tadi sepakat untuk menggunakan metode Omnibus, baik dalam perancangan undang-undangnya maupun juga perancangan Peraturan Pemerintah

(PP). Misalnya kalau nanti ada kaitan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang tentang TNI, Undang-Undang tentang Kehutanan, maka kita akan pertimbangkan ayat atau pasal yang saling terkait dengan kepolisian," kata Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Kamis.

Jimly menyebut salah satu PP yang mendesak untuk dibahas adalah PP pelaksanaan Undang-Undang (UU) ASN.

"PP dalam rangka melaksanakan UU ASN yang sejak 2023, belum disusun sampai sekarang sudah dua tahun lebih di era pemerintahan sebelumnya," katanya.

Ia juga menyebut salah satu keluhan yang diterima pihaknya adalah terkait penugasan anggota Polri lintas instansi. (wid, rls, dya)